

DKI Permudah Perizinan Usaha Niaga Elektronik

Sabtu, 5 Mei 2018 | 12:17

<http://sp.beritasatu.com/home/dki-permudah-perizinan-usaha-niaga-elektronik/123957>



Menteri Perdagangan, Thomas Lembong [ANTARA]

Berita Terkait

- Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor
- 3 Januari 2017, Pemprov DKI Lakukan Perombakan Pejabat dan Perampingan Organisasi
- FPDI-P: Persoalan Jakarta Masih Banyak
- Kejari Jaktim Tetapkan 2 Tersangka
- DKI Akan Ubah Konsep Camat Lurah Jadi Manajer Wilayah

[JAKARTA] Pemprov DKI mempermudah perizinan usaha niaga elektronik (e-commerce). Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Anies dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/5).

"Ini sangat sesuai dengan visi Jakarta sebagai 'smart city' untuk memberikan kemudahan usaha bagi penanam modal dalam dan luar negeri khususnya di e-commerce," kata Gubernur Anies, menyampaikan sambutan.

Nota kesepahaman yang ditandatangani bertujuan untuk memberikan kemudahan akses percepatan penanaman modal di bidang ekonomi digital. Hal itu dianggap penting untuk mendorong peningkatan penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.

Anies melanjutkan, penandatanganan nota kesepahaman merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Roadmap E-commerce) Tahun 2017-2019.

"Dengan adanya BKPM dan pemprov, kami siapkan desk di mal sehingga pelayanan bisa dilakukan di situ," ujarnya.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, kemudahan berusaha untuk bidang ekonomi digital harus dilakukan di Jakarta karena sebagian besar niaga elektronik tumbuh di Ibu Kota.

"Perkiraan pribadi 95 persen modal 'e-commerce' masuknya di Jakarta. Tokopedia, Bukalapak, Gojek semua ada di Jakarta," katanya.

Menurut dia, dalam empat tahun terakhir investasi di sektor tambang nikel dan ekonomi digital bertumbuh pesat. Sebab, perputaran uang dari dua sektor itu setiap tahunnya mencapai Rp 25 sampai 40 triliun.

"Jadi saya akui, kami dan pemerintah, dunia keteteran menanggapi fenomena dahsyat ini, baru belakangan saya sadari semuanya berpusat di Jakarta. Ini perkembangannya sangat cepat, begitu besar ketergantungan investasi nasional kita perlu menjaganya agar tidak ada apa-apa," kata Lembong. [E-11]